

BAB I

PENDAHULUAN

Republik Demokratik Timor Leste adalah sebuah negara kecil di sebelah utara Australia dan bagian timur pulau Timor. Selain itu wilayah negara ini juga meliputi pulau Kambing atau Atauro, Jaco, dan enklave Oecussi-Ambeno di Timor Barat

Timor Leste yang terletak di Pulau Timor bagian Timur, kurang dikenal masyarakat dunia karena daerah ini kurang memiliki arti ekonomis yang menonjol. Permasalahan ekonomi negara ini sangat buruk karena pengangguran masih banyak dan sulit dalam mendapatkan pekerjaan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dikarenakan sangat sempit sekali lapangan kerja yang dibuka oleh pemerintah bagi rakyatnya.

A. Alasan Pemilihan Judul

Sejak 20 Mei 2002 Negara ini berdiri menjadi sebuah Negara berdaulat namun kedaulatan tersebut belum menjiwai kehidupan rakyat Timor Leste, sekitar 90 % Rakyat Timor Leste adalah orang miskin. Setelah mencapai kemerdekaan dan telah menjadi Negara yang berdaulat, muncullah isu bahwa Negara ini masih sangat muda, semuanya tergantung pada bantuan Internasional walaupun Timor Leste memiliki sumber daya alam seperti Celah Timor (Timor GAP) , Café Timor, dan lain-lain. Namun, semua itu belum cukup. Timor Leste memerlukan banyak hal khususnya kesiapan Sumber Daya Manusia.

Melihat kondisi diatas maka banyak kaum muda berminat tinggi mencari ilmu diluar negeri untuk menjawab realitas tersebut, sebagian rakyat Timor Leste hingga sekarang masih sangat sulit mencari pekerjaan, dan pada umumnya mereka bekerja tetapi tidak sesuai dengan profesi mereka.¹

Melihat kondisi Timor Leste seperti yang telah tertulis diatas maka penulis tertarik untuk mengambil tema **“Upaya - Upaya Pemerintahan Timor Leste Membangun Perekonomian Negara Pasca Kemerdekaannya “**. Ini sangat menarik untuk dikaji karena dimata Internasional negara ini masih tergolong miskin dan sulit untuk bangkit dari masalah kemiskinan. Semoga tema yang diangkat dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dalam Kajian Hubungan Internasional.

B. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa penjelasan yang akan dicapai oleh penulis, antara lain:

1. Memberi rumusan masalah yang relevan untuk mencari jawaban dan penejelasan yang disusun dalam perumusan masalah, hipotesa dibuktikan dengan data dan fakta serta sebagai manifestasi penerapan teori-teori yang pernah penulis dapat selama di bangku kuliah.

¹ “Kemiskinan di Timor Leste”, dalam www.velika08.blogspot.com/2009/05/povu-kiak-iha-timor-leste.html, diunduh 11 Oktober 2010

2. Memberikan gambaran tentang kondisi Timor Leste dimata dunia Internasional bahwa hingga saat ini kian memburuk dalam kerjasama ekonominya dengan negara – negara lain.
3. Secara khusus, penulisan ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat bagi penulis dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan strata-1 (S-1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Setelah kemerdekaannya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi Negara yang berdaulat, perekonomian Timor Leste menjadi tidak stabil dan kemudian menjadikan negara itu sebagai negara termiskin di kawasan Asia sehingga rakyatnya menjadi semakin miskin keadaan ekonominya.

Salah satu masalah perekonomian yang dihadapi oleh Negara Timor Leste adalah masalah pengangguran. Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian suatu Negara karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-

masalah sosial lainnya.² Selain itu dalam Kondisi lain dapat dilihat bahwa masih banyak para tenaga kerja dan pelaku ekonomi asing turut memperumit sirkulasi perekonomian dalam negeri. Terkait dengan hal ini, Presiden Ramos Horta menyatakan agar masyarakat menanggapi dengan penuh bijaksana. Himbauan ini, pada satu sisi bersifat moralistik, yakni sebagai pendorong semangat kerja bagi penduduk.

Dilihat dari sisi lain, akan semakin memperburuk kondisi kehidupan rakyat ketika dihubungkan dengan tingginya angka pengangguran dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Melihat kondisi demografi (kependudukan) Timor Leste, berdasarkan sensus 2004, Timor Leste memiliki jumlah penduduk sebanyak 923.198 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 469.919 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 453.279 jiwa. Secara nasional, jumlah keluarga mencapai 194.962 rumah tangga dengan angka rata-rata 4,71 orang per rumah tangga. Rendahnya tingkat pendapatan per kapita rakyat Timor Leste berdampak pada kemampuan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan rendahnya kualitas penduduk secara umum, lebih-lebih bagi mereka yang tinggal di area pedesaan. Selain itu, banyak anggota masyarakat yang berpandangan jika kesempatan kerja di Timor Leste sangat terbatas dan angka pengangguran terus bertambah.

Dengan sempitnya lahan dan kekurangsuburan areal pertanian, tidak mendukungnya sistem pemasaran produk, keterbatasan sarana infrastruktur, rendahnya tingkat pendidikan penduduk, buruknya iklim investasi, lamanya praktek kolonialisme, munculnya kegiatan-kegiatan yang bersifat memanjakan

² “Dampak Pengangguran Terhadap Pembangunan Ekonomi di Timor Leste”, dalam www.dodogusmao.wordpress.com/2009/06/15/dampak-pengangguran-terhadap-pembangunan-ekonomi-di-timor-leste, diunduh 11 Oktober 2010

penduduk, konflik, adat dan budaya, perilaku dan mentalitas, serta ketidakstabilan pemerintahan telah dinilai oleh sebagian kalangan sebagai penyebab munculnya kemiskinan di Timor Leste ini. Itu semua merupakan tantangan bagi pemerintah ataupun negara dan juga masyarakat dari suatu negara untuk mengangkat tingkat kehidupan rakyatnya, ataupun mengurangi beban berat yang harus dipikul oleh rakyatnya. kemiskinan telah menjadi masalah fenomenal sepanjang perjalanan sejarah negara-negara modern dengan konsep nation state-nya, sejarahnya para negara yang rata-rata salah dalam memandang dan mengurus kemiskinan.

Di Timor Leste, tidak ada persoalan yang lebih besar yang dihadapi, selain daripada persoalan kemiskinan yang menyebabkan memburuknya perekonomian Negara tersebut. Kemiskinan telah membuat banyak anak-anak tidak bisa memperoleh pendidikan yang berkualitas, kesulitan dalam membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan kemiskinan telah menyebabkan jutaan rakyat dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papannya dilakukan secara terbatas.

Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh bekerja sepanjang hari, atau para pemuda menjadi buruh kasar bangunan tetapi mereka menerima upah yang rendah.

Ada argumentasi sederhana yang datang dari negara-negara yang sudah maju bahwa suatu negara menjadi miskin jika membiarkan penduduknya tumbuh menurut deret ukur. Penduduk yang tumbuh tidak terkendali pasti cepat menurun kemakmurannya karena produksi pangan tumbuh lambat mengikuti deret hitung.

Pada kenyataannya, kaum miskin di Timor Leste telah menunjukkan kemampuan yang kuat untuk mengatasi masalah hidupnya sendiri dan bertahan sekalipun dalam situasi politik dan kondisi ekonomi yang sulit. Salah satu dari strategi kemampuan utamanya ialah apa yang disebut *Informal Food Sector (IFS)*. Kegiatan mereka yang paling tampak adalah memproduksi makanan (di perkotaan, dan pedesaan), pengolahan makanan, melayani makanan untuk pesta-pesta, dan penjual eceran makanan segar (sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya) atau makanan yang diolah dan dijual di jalanan atau kaki lima (roti, pisang goreng, dan sebagainya).

Strategi ini memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Bahkan strategi *Informal Food Sector (IFS)* ini dapat menyumbang kepada keamanan pangan dengan menyediakan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan mempunyai potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Nasional. Strategi ini bersumber dari bahan baku pertanian. Artinya,

sektor pertanian telah menunjukkan peranannya sebagai instrumen pengentasan kemiskinan rakyat di Timor Leste.³

Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa di Timor Leste saat ini masih terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, terhitung sejak Negara itu merdeka. The World Bank menyimpulkan dengan data bahwa GNP (*Gross National Product*) atau PNB (Produk Nasional Bruto) Timor Leste sangat rendah. Data tahun 2009 yaitu Lower Middle Income saat ini \$558,000,000 dengan populasi (penduduk) sebanyak 1.133.594 jiwa dan juga GNI (Gross National Income) per kapita, Atlas method (current US\$) sebesar \$2,460 .⁴

Krisis ekonomi berkepanjangan yang terjadi di Timor Leste adalah masalah yang besar dan menghambat pembangunan ekonomi serta menghambat kesejahteraan rakyatnya. Untuk itu saat ini pemerintah Timor Leste masih mencari solusi dan mengupayakan perekonomian negaranya menjadi semakin membaik demi terciptanya keberhasilan pembangunan ekonominya.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Pemerintah Timor Leste Membangun Perekonomian Negaranya Pasca Merdeka?

³ “Kemiskinan, Pengangguran dan Pertanian”, dalam www.analisaekonomipolitik.blogspot.com, diunduh 11 Oktober 2010

⁴ “The Worl Bank”, dalam <http://data.worldbank.org/country/timor-leste>, diunduh 24 November 2010

E. Kerangka Dasar Konsep

Kerangka dasar pemikiran pada prinsipnya bertujuan untuk membantu penulis menentukan tujuan dan arah penulisan, serta memilih teori konsep untuk menyusun hipotesa. Untuk membantu menjelaskan permasalahan diatas penulis menggunakan Konsep neoliberal, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep Ekonomi Neoliberal

Konsep ekonomi neoliberal menurut Yanuar Ikbar, ekonomi dunia adalah faktor-faktor yang dapat menguntungkan pada pembangunan ekonomi independensi dan keterkaitan ekonomi maju dan yang kurang berkembang cenderung berpihak pada masyarakat yang kurang berkembang. Melalui perdagangan, bantuan internasional dan penanaman modal asing, ekonomi kurang berkembang mendapatkan pasar ekspor, modal dan teknologi yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Perdagangan ini mula-mula disimpulkan dalam "*The person Report, Partners in Development*'(1969). Walaupun ekonomi dunia dapat membantu atau justru malah menghalangi pembangunan melalui proses difusi, namun pandangan ini beranggapan, bahwa faktor terpenting yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah organisasi ekonomi domestik sendiri yang efisien.

Meskipun ekonomi liberal dalam pandangan internasional, uang dan investasi telah diterima secara umum, namun tidak ada teori pembangunan ekonomi yang satu sama lain dapat diperbandingkan. Sebab utamanya adalah karena teori-teori mengenai perdagangan, uang dan sebagainya mengasumsikan

keberadaan pasar. Teori ekonomi menyangkut teori individu rasional yang mencari untuk memaksimalkan kesejahteraan berdasarkan kondisi pasar.

Bagi ekonomi liberal, pembangunan ekonomi memerlukan dihapuskan hambatan sosial-politik terhadap berfungsinya dan efektivitas sistem pasar. Oleh karenanya, mereka lebih peduli bagaimana hal ini dapat tercapai. Sebaliknya pandangan ekonomi lainnya cenderung untuk menganggap adanya kerangka kerja pengaturan dan kelembagaan yang statis, yang terjadi dalam aktivitas ekonomi. Suatu teori pembangunan harus menerangkan perubahan tingkah laku dan kelembagaan (*behavioral* dan *institutional*). Meskipun studi pembangunan ekonomi gagal menghasilkan teori pembangunan yang dapat diterima oleh seluruh aliran liberal, namun masih ada persetujuan umum mengenai beberapa masalah yang mereka asumsikan.

Aliran liberalisme menganggap, bahwa ekonomi dunia yang independen berdasarkan perdagangan bebas, spesialisasi dan divisi tenaga kerja internasional mendorong pembangunan-pembangunan domestik. Arus barang, modal, teknologi meningkat efisien secara optimum dalam pengalokasian sumber-sumber daya sehingga meneruskan pertumbuhan dari Negara maju ke Negara berkembang (kurang berkembang).

Perdagangan dapat menjadi mesin pertumbuhan dan Negara kurang berkembang menjadi modal, teknologi dan masuk kedalam pasar dunia. Ini merupakan hubungan saling menguntungkan karena Negara-negara maju dapat menghasilkan bahan mentah yang lebih murah dan saluran bagi modal dan barang jadi mereka. Namun bagi Negara kurang berkembang, terutama yang mempunyai

pasar lebih kecil, membuka hubungan perdagangan dengan Negara maju dipercaya akan lebih menguntungkan mereka. Bahkan, apabila faktor-faktor produksi mengalir dari daerah tempat didapatkan keuntungan tertinggi, maka Negara kurang berkembang yang mempunyai *surplus* tenaga kerja dan devisa “*saving*” dapat memperoleh pemasukan modal asing yang mempercepat pertumbuhan ekonomi mereka.

Konsep pertumbuhan ekonomi yang menganggap bahwa banyak faktor yang diperlukan agar pembangunan ekonomi terdifusi dari inti (*core*) ekonomi dunia yang maju ke Negara kurang berkembang di periferi (pinggiran). Laju dan arah dari pengaruh penyebaran ini tergantung dari beberapa faktor:

1. Perpindahan internasional dari faktor-faktor ekonomi (modal, tenaga kerja, pengetahuan)
2. Volume, persyaratan dan komposisi dari perdagangan pihak asing
3. Mekanisasi dari sistem moneter internasional.

Meskipun liberalisme sadar bahwa kemajuan ekonomi tidak seragam atau tidak sama (baik pada ekonomi domestik ataupun ekonomi internasional), mereka percaya bahwa dalam jangka panjang, operasi kekuatan pasar mengarah pada persamaan tingkat ekonomi, upah riil dan harga-harga diantara Negara-negara dan kawasan.

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa karena tidak adanya ide-ide teori yang diterima secara umum, maka debat diantara liberalis mengenai pembangunan ekonomi difokuskan pada pilihan yang strategis dan jalan alternatif menuju pembangunan ekonomi, yaitu kebulatan tekad dari kebijakan ekonomi

dalam mencapai ekonomi pasar yang efisien. Mereka yakin bahwa penyebab dari kemiskinan internasional adalah kurang terintegrasinya Negara kurang berkembang kedalam ekonomi dunia, dan kebijakan irasional Negara yang menghambat pembangunan pasar yang berfungsi baik.⁵

Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik akhir abad kedupuluhan, sebenarnya merupakan redefinisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan Distorsi dan *High Cost Economy* yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif. Paham ini memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari meningkatkan standar hidup masyarakat atau rakyat sebuah negara dan modernisasi melalui peningkatan efisiensi perdagangan dan mengalirnya investasi

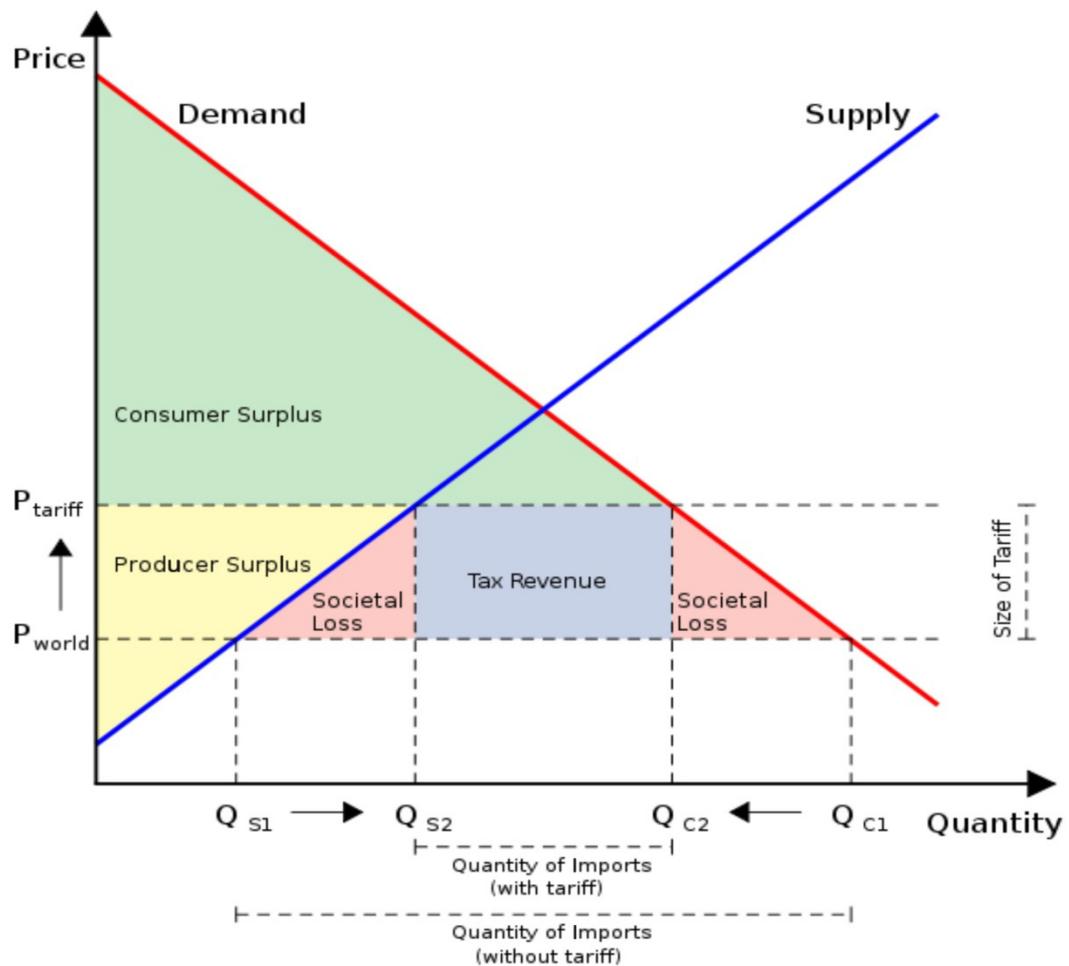
Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. Seperti pada contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah tenaga kerja sepenuhnya ini urusan antara pengusaha pemilik modal dan pekerja. Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas-aktivitas

⁵ Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional 1 konsep dan teori*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal 79-83

ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang dimiliki dan dikelola pemerintah.

Tapi privatisasi ini tidak terjadi pada negara-negara kapitalis besar, justru terjadi pada negara-negara Amerika Selatan dan negara-negara miskin berkembang lainnya. Privatisasi ini telah mengalahkan proses panjang nasionalisasi yang menjadi kunci negara berbasis kesejahteraan. Nasionalisasi yang menghambat aktivitas pengusaha harus dihapuskan.

Grafik 1 : Prinsip Ekonomi



Sumber : Wikipedia

Revolusi neoliberalisme ini bermakna bergantinya sebuah manajemen ekonomi yang berbasiskan persediaan menjadi berbasis permintaan. Sehingga menurut kaum neoliberal, sebuah perekonomian dengan inflasi rendah dan pengangguran tinggi, tetap lebih baik dibanding inflasi tinggi dengan pengangguran rendah. Tugas pemerintah hanya menciptakan lingkungan sehingga modal dapat bergerak bebas dengan baik.

Dalam titik ini pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan memotong pengeluaran, memotong biaya-biaya publik seperti subsidi, sehingga fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan publik harus dikurangi.

Akhirnya logika pasarlah yang berjaya diatas kehidupan publik. Ini menjadi pondasi dasar neoliberalisme, menundukan kehidupan publik ke dalam logika pasar. Semua pelayanan publik yang diselenggarakan negara harusnya menggunakan prinsip untung-rugi bagi penyelenggara bisnis publik tersebut, dalam hal ini untung rugi ekonomi bagi pemerintah. Pelayanan publik semata, seperti subsidi dianggap akan menjadi pemborosan dan inefisiensi. Neoliberalisme tidak mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum.

Tidak ada wilayah kehidupan yang tidak bisa dijadikan komoditi barang jualan. Semangat neoliberalisme adalah melihat seluruh kehidupan sebagai sumber laba korporasi. Misalnya dengan sektor sumber daya air, program liberalisasi sektor sumber daya air yang implementasinya dikaitkan oleh Bank Dunia dengan skema watsal atau *water resources sector adjustment loan*. Air dinilai sebagai barang ekonomis yang pengelolaannya pun harus dilakukan

sebagaimana layaknya mengelola barang ekonomis. Dimensi sosial dalam sumberdaya *public goods* direduksi hanya sebatas sebagai komoditas ekonomi semata. Hak penguasaan atau konsesi atas sumber daya air ini dapat dipindah tangankan dari pemilik satu ke pemilik lainnya, dari satu korporasi ke korporasi lainnya, melalui mekanisme transaksi jual beli. Selanjutnya sistem pengaturan beserta hak pengaturan penguasaan sumber air ini lambat laun akan dialihkan ke suatu badan berbentuk korporasi bisnis atau konsorsium korporasi bisnis yang dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan swasta nasional atau perusahaan swasta atau bahkan perusahaan multinasional dan perusahaan transnasional.

Satu kelebihan neoliberalisme adalah menawarkan pemikiran politik yang sederhana, menawarkan penyederhanaan politik sehingga pada titik tertentu politik tidak lagi mempunyai makna selain apa yang ditentukan oleh pasar dan pengusaha. Dalam pemikiran neoliberalisme, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai, sedangkan secara bersamaan neoliberalisme menganggap hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua pemikiran diluar rel pasar dianggap salah.

Kapitalisme neoliberal menganggap wilayah politik adalah tempat dimana pasar berkuasa, ditambah dengan konsep globalisasi dengan perdagangan bebas sebagai cara untuk perluasan pasar melalui *World Trade Organization (WTO)*, akhirnya sering dianggap sebagai neoimperialisme.⁶

Dalam menerapkan neoliberalisme dalam kebijakan pemerintahan ada beberapa bentuk, diantaranya adalah :

⁶ "Neo Liberal", dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme#Neoliberalisme>, diunduh 29 Desember 2010

1. Pasar bebas atau *Free Trade* merupakan perwujudan dari sistem ekonomi yang menekankan pada kebebasan individu untuk menciptakan kekayaan. Bila diharuskan untuk menyebutkan kriteria *public goods*, maka libertarianisme hanya mengakui aspek-aspek yang berada di bawah kontrol pemerintah sebagai wujud *public goods*, yaitu pertahanan nasional, serta hukum dan perangkat regulasi yang berfungsi melindungi hak-hak asasi manusia.⁷
2. pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi
3. Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi dan diplomasi
4. Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas
5. Pengurangan Subsidi
6. Mengutamakan Privatisasi atau Penjualan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
7. Deregulasi/Penghilangan campur tangan pemerintah
8. pengurangan peran negara dalam layanan sosial (*Public Service*) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya⁸

⁷ “Liberalisasi Dalam Suatu Demokrasi”, dalam <http://go-kerja.com/liberalisasi-dalam-suatu-demokrasi-2/>, diunduh 29 Desember 2010

⁸ “Makalah Sistem Ekonomi Neoliberal”, dalam <http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/05/makalah-sistem-ekonomi-neoliberal.html>, diunduh 29 Desember 2010

Dari definisi-definisi diatas dapat dilihat dari diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Timor Leste dalam menjalankan ekonomi pemerintahannya adalah mengambil kebijakan dari konsep Ekonomi Neoliberalisme yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Negara-negara maju maupun berkembang dalam bidang ekonomi khususnya. Dapat dilihat, bahwa pemerintah Timor Leste juga mengadakan kerjasama dengan penanam modal asing untuk memproduksi didalam negaranya demi kemajuan Negara dan rakyatnya.

Tujuan daripada kerjasama-kerjasama tersebut adalah untuk penambahan devisa Negara dari perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke ada di Timor Leste. Disamping itu juga pemerintahannya melakukan diplomasi dengan Negara-negara untuk mendapatkan donatur atau bantuan dari negara lain sebagai pemasukan diluar kerjasama sistem mutualisme (saling menguntungkan).

F. Hipotesa

Dari latar belakang, pokok permasalahan yang dikaitkan dengan kerangka pemikiran dengan teori yang penulis kemukakan dapat diketahui bahwa : *Upaya – Upaya Pemerintahan Timor Leste Membangun Perekonomian Negara Pasca Kemerdekaannya* adalah :

Pemerintah Timor Leste menerapkan sistem ekonomi neoliberal dengan mengadakan perdagangan bebas atau *free trade*, Mengutamakan Privatisasi atau Penjualan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengurangan subsidi, pengurangan peran negara dalam layanan sosial atau *Public Servic* seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya serta mengupayakan segala bentuk

kerjasama dengan negara-negara tetangga khususnya dalam bidang ekonomi dan menjalin kerjasama industri-industri asing serta mencari donatur-donatur dari luar negeri untuk melakukan produksinya sebagai sumber devisa negara.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis membatasi dalam penelitian dan pengamatannya atas masalah-masalah perekonomian Pemerintahan Timor Leste dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mengatasi semakin buruknya perekonomian di Timor Leste sejak 2002-2010.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Analisa kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisa dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenis itu.⁹ Untuk itu dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang upaya pemerintah Timor Leste dalam menyelesaikan masalah perekonomian negaranya.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data atau studi kepustakaan. Yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data yang diambil dari data primer dan data sekunder dari literatur-literatur, surat kabar, internet dan sumber-sumber yang relevan yang kemudian relevansinya akan menjadikan penelitian ini menjadi sebuah penelitian yang ilmiah.

⁹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, Hal.95

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (Empat) bab yang masing-masing bab membahas hal yang berbeda-beda untuk memudahkan memahami skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I Merupakan penggambaran skripsi secara umum, yaitu Pokok bahasan mengenai pendahuluan dengan sub pokok bahasan diantaranya, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar konsep, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab ini penulis memberi gambaran tentang Kondisi Timor Leste Sebelum dan setelah kemerdekaannya serta kondisi saat ini.

BAB III Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang ekspor dan impor Timor Leste, hubungan dan kerjasama Timor Leste dengan Negara-negara tetangga, yaitu hubungan bilateral dan Kerjasama Timor Leste dengan Negara Republik Indonesia dan Australia, serta peran dari lembaga -lembaga donor internasional di Timor Leste. Yaitu International Monetary Fund (IMF), World Bank dan Asian Development Bank (ADB).

BAB IV Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan – pembahasan dalam skripsi ini.